



Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu

Annisa Azzahra, Zulkarnaini

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

annisa.azzahra0231@student.unri.ac.id, zulkarnainifisip@lecturer.unri.id*

Abstrak

Tingginya jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menangani anak putus sekolah, mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya, dan merumuskan implikasi perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemilihan lima informan secara purposive, meliputi unsur Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, dan orang tua anak putus sekolah. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis menggunakan kerangka manajemen strategis Hunger dan Wheelen yang terdiri atas pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, sosialisasi, serta menyediakan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Program Paket A, B, dan C. Namun, strategi belum terlaksana secara optimal karena pembaruan data belum konsisten, penjangkauan keluarga belum merata, anggaran khusus belum tersedia, dan evaluasi lebih menekankan pelaksanaan kegiatan daripada keberhasilan anak kembali belajar. Hambatan lainnya meliputi kondisi ekonomi keluarga, keterlibatan anak dalam pekerjaan, rendahnya motivasi pendidikan, mobilitas penduduk, serta keterbatasan akses geografis. Penelitian menyimpulkan bahwa perbaikan memerlukan data kasus yang terverifikasi, penjangkauan aktif berbasis keluarga, dukungan biaya pendidikan tidak langsung, layanan kesetaraan yang fleksibel, dan indikator evaluasi berbasis hasil. Rekomendasi tersebut merupakan arahan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Putus Sekolah

Abstract

The high number of school dropouts in Rokan Hulu Regency indicates persistent challenges in ensuring equitable access to education and sustained participation in learning. This study aims to analyze local government strategies for addressing school dropout, identify barriers to implementation, and formulate implications for policy improvement. A descriptive qualitative approach was applied, involving five purposively selected informants representing the Education Office, subdistrict governments, and parents of children who had left school. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and document review, and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The analysis adopted Hunger and Wheelen's strategic management framework, comprising environmental scanning, strategy formulation, implementation, and evaluation and control. The findings indicate that the local government has undertaken data collection, coordination with subdistrict and village authorities, public outreach, and provision of equivalency education through community learning centers offering Packages A, B, and C. However, implementation remains suboptimal because case data are not consistently updated, family outreach is uneven, dedicated funding is unavailable, and evaluation focuses more on activities than on successful re-entry into education. Additional barriers include household economic hardship, children's involvement in work, limited educational motivation, population mobility, and geographical access constraints. The study concludes that improved responses require verified case-level data, proactive family-based outreach, support for indirect education costs, flexible equivalency learning, and outcome-oriented monitoring indicators. These policy directions should be adapted to local service capacity and the varying needs of communities across the regency.

Keywords: Strategy, Local Government, School Dropout

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan layanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan sosial. Efektivitas layanan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

sekolah dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kelompok yang berisiko keluar dari sistem pendidikan, menjangkau keluarga sasaran, dan menyediakan jalur kembali ke pendidikan. Kualitas tata kelola publik dan efektivitas pemerintahan berhubungan dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki ruang untuk menyesuaikan program dengan karakteristik wilayah.

Di Kabupaten Rokan Hulu, komitmen terhadap keberlanjutan pendidikan tercermin dalam kebijakan wajib belajar dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 yang memuat peningkatan akses, pendidikan kesetaraan, serta pengendalian angka putus sekolah. Namun, data tahun 2024 menunjukkan masih terdapat 1.184 anak putus sekolah pada jenjang SD dan 1.172 anak pada jenjang SMP. Jumlah tersebut menempatkan Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan hasil yang diterima masyarakat.

Kasus putus sekolah di Rokan Hulu tidak terkonsentrasi pada satu kecamatan. Jumlah kasus SD tertinggi ditemukan di Tambusai Utara, Bonai Darussalam, dan Tambusai, sedangkan pada jenjang SMP jumlah tertinggi terdapat di Tambusai, Tambusai Utara, dan Kunto Darussalam. Pola tersebut memperlihatkan bahwa strategi penanganan perlu bersifat terarah dan tidak seragam. Ketersediaan 374 sekolah dasar dan 135 sekolah menengah pertama juga belum otomatis menjamin keberlanjutan pendidikan karena keputusan anak untuk berhenti sekolah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keluarga, motivasi belajar, pekerjaan, mobilitas penduduk, dan akses wilayah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah tidak dapat ditangani hanya melalui penyediaan fasilitas pendidikan. Faktor ekonomi keluarga, biaya tidak langsung pendidikan, rendahnya dukungan keluarga, serta ketertarikan anak untuk bekerja berpengaruh terhadap keputusan meninggalkan sekolah. Penelitian di Pekanbaru juga menunjukkan bahwa program wajib belajar dan bantuan umum belum selalu diikuti oleh dukungan masyarakat, koordinasi, pengawasan, dan program khusus yang memadai. Sementara itu, studi mengenai strategi pemerintah di daerah lain menekankan pentingnya perencanaan, koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran, dan evaluasi program.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Paket A, Paket B, dan Paket C. Keberadaan PKBM memberi peluang bagi anak yang telah keluar dari sekolah formal untuk kembali memperoleh layanan pendidikan. Akan tetapi, efektivitas strategi tidak cukup diukur dari tersedianya lembaga atau program, melainkan juga dari ketepatan pendataan sasaran, keterjangkauan sosialisasi, koordinasi antaraktor, kesinambungan bantuan, dan capaian peserta.

Penelitian ini menggunakan kerangka manajemen strategis Hunger dan Wheelen yang memandang strategi sebagai siklus yang terdiri atas pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Kerangka ini dipilih karena memungkinkan analisis terhadap keterhubungan antara identifikasi masalah, pilihan program, pelaksanaan di lapangan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Rokan Hulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024

Jenjang	Jumlah Anak Putus Sekolah	Keterangan	Sumber
SD	1.184	Jumlah tinggi pada tingkat provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2025
SMP	1.172	Jumlah tinggi pada tingkat provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2025

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana pemerintah daerah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi penanganan anak putus sekolah.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, proses, dan makna yang disampaikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam layanan pendidikan. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu serta wilayah Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Rambah Samo.

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap penanganan anak putus sekolah. Total informan berjumlah lima orang, yaitu Pelaksana Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, Pelaksana Teknis Camat Tambusai Utara, Pelaksana Teknis Camat Rambah Samo, dan dua orang tua anak putus sekolah. Pemilihan beberapa kategori informan dimaksudkan untuk membandingkan perspektif pemerintah dengan pengalaman penerima layanan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, rencana strategis instansi, data anak putus sekolah, data sekolah, dokumen kelembagaan, dan petunjuk pelaksanaan program. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan fokus pada penyebab putus sekolah, pendataan, koordinasi, program pendidikan kesetaraan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa konsistensi antara keterangan informan dan dokumen kebijakan.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara dikelompokkan ke dalam empat indikator utama sesuai kerangka Hunger dan Wheelen, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Temuan dari setiap kategori informan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara rencana pemerintah dan pengalaman masyarakat.

Tabel 2. Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu	1	Informasi kebijakan, program, anggaran, dan evaluasi
Plt. Camat Tambusai Utara	1	Koordinasi wilayah dan pelaksanaan program
Plt. Camat Rambah Samo	1	Pendataan, koordinasi desa, dan kendala lapangan
Orang tua anak putus sekolah	2	Pengalaman penerima layanan dan kebutuhan keluarga

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengamatan lingkungan

Pada tahap pengamatan lingkungan, Dinas Pendidikan telah mengenali bahwa masalah putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses sekolah. Informan pemerintah menyebut faktor ekonomi keluarga, keinginan anak bekerja, rendahnya motivasi belajar, pengaruh lingkungan, mobilitas penduduk, dan kendala akses pada kawasan perkebunan atau permukiman yang jauh. Pemerintah juga telah memetakan kapasitas kelembagaan berupa Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta sekitar 21 PKBM yang dapat menjadi jalur pendidikan kesetaraan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan telah mencakup faktor internal dan eksternal, tetapi kualitas pendataan belum konsisten. Pemerintah kecamatan menghadapi kesulitan menelusuri anak putus sekolah yang berpindah tempat tinggal, sementara keluarga yang diwawancarai menyatakan belum selalu terjangkau oleh pendataan langsung. Ketidakakuratan data berisiko menyebabkan program tidak tepat sasaran karena pemerintah tidak memiliki daftar sasaran yang selalu mutakhir.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penanganan putus sekolah memerlukan data sasaran yang akurat dan pemahaman terhadap faktor ekonomi, sosial, dan keluarga. Dengan demikian, pengamatan

lingkungan di Rokan Hulu sudah mengidentifikasi penyebab utama, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan basis data operasional yang dapat digunakan untuk penjangkauan kasus secara sistematis.

Pengamatan lingkungan dapat dipahami sebagai proses menghubungkan karakteristik masalah dengan sumber daya yang tersedia. Pada sisi eksternal, penyebab putus sekolah tersebar pada dimensi ekonomi, sosial, dan geografis; sementara pada sisi internal pemerintah telah mempunyai jaringan sekolah, kecamatan, desa, dan PKBM. Kedua sisi tersebut seharusnya dipetakan bersamaan sehingga kapasitas layanan tidak dibaca terpisah dari hambatan yang dialami keluarga. Interpretasi ini merupakan pendalaman analitis terhadap keterangan informan, bukan temuan kuantitatif tambahan.

Data agregat dapat menggambarkan besar masalah, tetapi belum memadai untuk menentukan bentuk pendampingan setiap anak. Satu anak mungkin menghadapi kendala transportasi, sedangkan anak lain membutuhkan penyesuaian waktu belajar karena telah bekerja. Oleh sebab itu, kategori alasan berhenti sekolah perlu dicatat secara konsisten bersama usia, pendidikan terakhir, status domisili, dan pilihan jalur pendidikan. Pemilahan tersebut memberi dasar bagi rujukan layanan formal maupun nonformal yang lebih tepat.

Mobilitas penduduk menjadi persoalan penting ketika seorang anak sudah tidak tercatat aktif di sekolah asal tetapi juga belum masuk sekolah tujuan. Dalam konteks ini, pembaruan data tidak hanya membutuhkan pencatatan berkala, melainkan juga mekanisme konfirmasi lintas wilayah. Verifikasi melalui perangkat desa, satuan pendidikan, dan petugas kecamatan dapat mengurangi kemungkinan pencatatan ganda dan membantu menemukan anak yang tidak tampak dalam laporan rutin. Pemanfaatan data harus tetap memperhatikan kerahasiaan identitas dan perlindungan anak.

3.2 Perumusan strategi

Perumusan strategi dilakukan melalui pemanfaatan pendidikan kesetaraan pada PKBM, pendataan berbasis desa, koordinasi dengan kecamatan dan desa, serta rencana pendekatan jemput bola kepada anak yang tidak lagi berada dalam pendidikan formal. Dinas Pendidikan juga merencanakan kerja sama dengan administrasi kependudukan agar identitas dan domisili anak dapat diverifikasi ketika terjadi perpindahan penduduk.

Dari sisi pendanaan, tidak terdapat anggaran khusus daerah yang secara spesifik ditujukan untuk penanganan anak putus sekolah. Dukungan utama bagi PKBM berasal dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sehingga peserta tertentu dapat mengikuti program kesetaraan tanpa biaya pendidikan langsung. Akan tetapi, ketiadaan bantuan khusus untuk kebutuhan tidak langsung, seperti transportasi, seragam, buku, dan biaya hidup, menjadi celah penting dalam desain strategi.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa strategi pemerintah daerah lebih efektif apabila perumusan kebijakan diikuti dukungan lintas sektor, sumber daya, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Di Rokan Hulu, komponen tersebut telah mulai terbentuk, tetapi beberapa rencana masih bersifat administratif dan belum seluruhnya diterjemahkan menjadi mekanisme layanan yang terukur.

Perumusan strategi perlu membedakan tujuan umum, kelompok sasaran prioritas, dan instrumen pelaksanaan. Tujuan mengurangi jumlah anak putus sekolah dapat diturunkan menjadi langkah yang lebih operasional: memverifikasi anak sasaran, menghubungi keluarga, menilai hambatan, memilih jalur pendidikan, serta memantau partisipasi. Urutan ini memungkinkan pemerintah menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan riil keluarga. Tanpa alur layanan yang disepakati, koordinasi berisiko berhenti pada pertukaran informasi antarlembaga.

Keterbatasan anggaran khusus juga menuntut pengelompokan kebutuhan berdasarkan urgensi. Dukungan bagi keluarga tidak selalu identik dengan biaya sekolah karena program kesetaraan dapat mengurangi beban biaya langsung. Sebaliknya, ongkos perjalanan, perlengkapan, dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dapat menjadi hambatan yang lebih menentukan. Strategi yang sensitif terhadap kondisi keluarga dapat mengarahkan koordinasi dengan program bantuan sosial yang sudah ada, sepanjang memenuhi syarat dan kewenangan masing-masing instansi.

Pembagian peran perlu dinyatakan dalam prosedur yang mudah dipahami pelaksana. Dinas Pendidikan dapat bertugas pada standar layanan, pembinaan, dan pengolahan data; kecamatan mengoordinasikan tindak lanjut wilayah; desa membantu identifikasi dan pendekatan keluarga; sedangkan PKBM memberikan penjelasan pilihan

belajar. Pembagian tersebut merupakan usulan penataan mekanisme yang berangkat dari fungsi para aktor yang ditemukan dalam penelitian, bukan pernyataan bahwa seluruh prosedur sudah diterapkan.

3.3 Implementasi strategi

Implementasi strategi terutama bertumpu pada layanan PKBM dengan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah kecamatan berperan melakukan koordinasi dengan desa dan sekolah, sedangkan Dinas Pendidikan membina jalur pendidikan masyarakat. Skema ini memberikan pilihan bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal dan merupakan instrumen penting untuk memulihkan akses pendidikan.

Walaupun program tersedia, pengalaman masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan pelaksanaan. Dua orang tua anak putus sekolah yang diwawancarai belum pernah menerima kunjungan langsung dari Dinas Pendidikan atau kecamatan untuk mengajak anak kembali belajar. Mereka juga belum memahami secara lengkap prosedur mengikuti PKBM dan lebih menekankan kebutuhan bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan program belum otomatis menghasilkan keterjangkauan layanan.

Pelaksanaan juga dipengaruhi oleh preferensi anak yang telah bekerja dan memperoleh penghasilan. Setelah lama berada di luar sekolah, sebagian anak lebih sulit didorong kembali ke kegiatan belajar. Karena itu, implementasi pendidikan kesetaraan perlu disertai penjangkauan keluarga, jadwal belajar fleksibel, dukungan biaya tidak langsung, dan bila memungkinkan penguatan keterampilan yang tetap terintegrasi dengan penyelesaian pendidikan. Pendekatan semacam ini relevan dengan temuan tentang pentingnya dukungan sosial, motivasi, dan bentuk layanan yang adaptif.

Implementasi pendidikan kesetaraan perlu dilihat dari perjalanan peserta sejak memperoleh informasi hingga tetap mengikuti kegiatan belajar. Pada tahap awal, keluarga memerlukan keterangan sederhana mengenai lokasi PKBM, persyaratan pendaftaran, jadwal, serta kemungkinan dukungan yang tersedia. Tahap berikutnya adalah pendampingan ketika anak beradaptasi dengan rutinitas belajar. Hambatan yang tidak diselesaikan setelah pendaftaran dapat menyebabkan ketidakhadiran dan pengunduran diri kembali.

Pengalaman dua orang tua dalam penelitian mengindikasikan adanya jarak antara tersedianya program dan informasi yang diterima rumah tangga sasaran. Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasikan sebagai pengalaman semua keluarga di Kabupaten Rokan Hulu karena jumlah informan terbatas. Akan tetapi, kesenjangan yang terungkap cukup relevan untuk menunjukkan perlunya mengevaluasi efektivitas saluran sosialisasi, bukan hanya jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pemerintah.

Anak yang telah bekerja mungkin menghadapi konflik antara jam belajar dan jam mencari nafkah. Dalam situasi demikian, jadwal yang lebih adaptif dan pendampingan motivasional berpotensi membantu partisipasi, selama mutu pembelajaran tetap terjaga. PKBM dapat dipertimbangkan sebagai titik temu antara tujuan penyelesaian pendidikan dan kebutuhan keterampilan kehidupan. Perancangan kegiatan tambahan perlu mengikuti aturan pendidikan kesetaraan dan kemampuan penyelenggara; penelitian ini tidak mengukur efektivitas suatu model jadwal tertentu.

Koordinasi operasional juga dapat diperkuat melalui alur rujukan yang ringkas. Ketika aparat desa menemukan anak putus sekolah, informasi dasar diverifikasi, disampaikan melalui jalur resmi kepada pengelola pendidikan, lalu diteruskan ke sekolah atau PKBM sesuai kebutuhan. Pemerintah kemudian mencatat apakah keluarga telah dihubungi, menerima penjelasan, melakukan pendaftaran, atau masih menghadapi kendala. Mekanisme tersebut akan lebih bermanfaat daripada sekadar pelaporan jumlah anak karena memungkinkan tindak lanjut terpantau.

3.4 Evaluasi dan pengendalian

Evaluasi program belum menggunakan indikator hasil yang terukur secara konsisten. Pemantauan masih banyak berfokus pada pelaksanaan program dan keberadaan lembaga, sedangkan indikator seperti jumlah anak yang berhasil kembali belajar, persentase kehadiran, keberlanjutan peserta, jumlah peserta yang menyelesaikan Paket A, B, atau C, serta jumlah anak yang kembali putus belum menjadi dasar evaluasi yang sistematis.

Dalam kerangka Hunger dan Wheelen, evaluasi dan pengendalian seharusnya membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki strategi. Tanpa ukuran hasil

yang jelas, pemerintah sulit menilai apakah peningkatan jumlah layanan benar-benar mengurangi angka putus sekolah. Evaluasi berbasis outcome juga diperlukan agar pemerintah dapat membedakan antara program yang hanya terlaksana secara administratif dan program yang efektif mengembalikan anak ke jalur pendidikan.

Evaluasi berbasis hasil memerlukan pembedaan antara masukan, proses, keluaran, dan dampak jangka menengah. Anggaran serta jumlah petugas merupakan masukan; pendataan dan kunjungan merupakan proses; pendaftaran kembali merupakan keluaran; sedangkan kehadiran berkelanjutan dan penyelesaian program lebih dekat dengan hasil pendidikan. Pembedaan ini penting agar keberhasilan tidak disimpulkan hanya karena kegiatan administratif telah diselenggarakan.

Pengukuran dapat dimulai dengan sejumlah indikator realistis, misalnya proporsi kasus yang telah diverifikasi, keluarga yang berhasil dihubungi, anak yang mendaftar kembali, peserta yang masih aktif setelah tiga dan enam bulan, serta peserta yang menyelesaikan program. Indikator tersebut sebaiknya memiliki definisi operasional, periode pengukuran, penanggung jawab pencatatan, dan sumber verifikasi yang jelas. Nilai target tidak ditetapkan dalam penelitian ini karena tidak tersedia data dasar yang cukup untuk menghitung sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian strategi seharusnya memberikan ruang umpan balik dari keluarga dan pelaksana PKBM. Jika suatu kegiatan sosialisasi banyak dilakukan tetapi hanya sedikit anak yang mendaftar, pemerintah perlu memeriksa kesesuaian pesan, lokasi layanan, dan kesulitan administratif. Sebaliknya, apabila pendaftaran meningkat tetapi kehadiran menurun, evaluasi perlu beralih pada penyebab keberlanjutan belajar. Dengan pola tersebut, hasil pemantauan bukan semata arsip, tetapi masukan yang mengubah keputusan berikutnya.

3.5 Faktor penghambat strategi

Faktor penghambat paling menonjol adalah kondisi ekonomi keluarga. Orang tua yang diwawancarai menyampaikan bahwa biaya pendidikan tidak berhenti pada uang sekolah, tetapi mencakup seragam, buku, sepatu, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ketika pendapatan keluarga terbatas, anak cenderung diminta membantu bekerja. Kondisi ini menjelaskan mengapa pendidikan kesetaraan yang bebas biaya belum selalu cukup untuk mengembalikan anak ke proses belajar.

Faktor kedua adalah rendahnya kesadaran dan motivasi pendidikan. Sebagian orang tua lebih memprioritaskan pendapatan jangka pendek, sedangkan anak yang sudah bekerja merasa lebih nyaman memperoleh penghasilan daripada kembali belajar. Faktor ketiga adalah keterbatasan anggaran dan bantuan pendidikan. Belum adanya anggaran khusus daerah maupun beasiswa khusus anak putus sekolah membuat intervensi pemerintah sulit menjangkau kebutuhan keluarga secara komprehensif.

Faktor berikutnya adalah pendataan dan sosialisasi yang belum optimal. Mobilitas penduduk menyebabkan daftar sasaran cepat berubah, sementara informasi mengenai PKBM belum merata. Terakhir, pelaksanaan program di lapangan belum menjangkau seluruh keluarga dan pada beberapa wilayah masih terdapat hambatan geografis. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa masalah putus sekolah bersifat multidimensi dan memerlukan strategi lintas sektor, bukan hanya intervensi pendidikan.

Hambatan ekonomi perlu dipahami sebagai rangkaian keputusan rumah tangga dalam mengelola sumber daya terbatas. Biaya langsung, biaya transportasi, dan hilangnya kontribusi penghasilan anak dapat muncul secara bersamaan. Karena itu, pembebasan biaya pendidikan saja belum tentu mengatasi alasan utama anak meninggalkan sekolah. Pernyataan informan mengenai kebutuhan perlengkapan dan dukungan biaya menguatkan pentingnya pemeriksaan kebutuhan keluarga secara individual sebelum memilih intervensi.

Rendahnya motivasi pendidikan juga tidak selalu berdiri sendiri sebagai persoalan sikap. Pengalaman tertinggal pelajaran, ketertarikan pada pekerjaan, serta persepsi bahwa pendidikan tidak segera menghasilkan penghasilan dapat memengaruhi keputusan anak. Pendekatan kebijakan yang sekadar mengimbau untuk kembali belajar berpotensi tidak menjawab kondisi tersebut. Komunikasi yang menghargai pengalaman anak dan keluarga serta memberikan pilihan belajar yang dapat dijalankan lebih mungkin menciptakan keterlibatan yang bermakna.

Kendala geografis dan perpindahan domisili memperlihatkan bahwa model pelayanan seragam tidak selalu efektif. Wilayah dengan permukiman terpencar memerlukan strategi penjangkauan berbeda dari kawasan yang lebih dekat

dengan sekolah atau PKBM. Namun, penelitian ini tidak menyediakan pengukuran jarak, waktu tempuh, maupun biaya transportasi setiap informan. Oleh sebab itu, analisis geografis dalam artikel ini harus dibaca sebagai identifikasi kendala kualitatif yang masih memerlukan pendataan teknis untuk perencanaan layanan.

3.6 Implikasi kebijakan

Kesenjangan antarwilayah menunjukkan perlunya prioritas penanganan berbasis tingkat masalah. Data kecamatan memperlihatkan bahwa Tambusai Utara memiliki 191 anak putus sekolah pada jenjang SD dan 140 pada jenjang SMP, Tambusai memiliki 143 anak SD dan 152 anak SMP, sedangkan Kunto Darussalam memiliki 118 anak SD dan 108 anak SMP. Bonai Darussalam juga mencatat 151 anak putus sekolah pada jenjang SD. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar awal untuk menentukan lokasi penjangkauan aktif, dengan tetap mempertimbangkan proporsi terhadap jumlah penduduk usia sekolah dan dinamika perpindahan penduduk.

Prioritas pertama adalah membangun mekanisme pemutakhiran data kasus yang operasional. Pendataan tidak cukup dilakukan untuk kebutuhan laporan, tetapi perlu menghasilkan daftar sasaran yang dapat ditindaklanjuti oleh desa, kecamatan, sekolah, dan PKBM. Setiap kasus idealnya memiliki informasi mengenai status pendidikan terakhir, penyebab berhenti, kondisi ekonomi keluarga, keberadaan dokumen kependudukan, jarak ke layanan pendidikan, serta pilihan jalur kembali ke pendidikan.

Prioritas kedua adalah memperkuat penjangkauan keluarga. Pengalaman orang tua dalam penelitian menunjukkan bahwa sebagian sasaran belum pernah menerima kunjungan langsung. Karena itu, sosialisasi umum perlu dilengkapi pendekatan kasus per kasus, terutama pada keluarga dengan hambatan ekonomi dan anak yang telah bekerja. Penjangkauan langsung memungkinkan pemerintah menjelaskan pilihan layanan, mengidentifikasi kebutuhan biaya tidak langsung, dan menghubungkan keluarga dengan program perlindungan sosial atau dukungan pendidikan yang relevan.

Prioritas ketiga adalah mengubah evaluasi dari sekadar pelaporan kegiatan menjadi pengukuran hasil. Pemerintah daerah dapat menetapkan indikator sederhana dan konsisten, seperti jumlah kasus terverifikasi, jumlah anak yang berhasil didaftarkan kembali, tingkat kehadiran tiga dan enam bulan, jumlah peserta yang bertahan sampai akhir semester, serta jumlah peserta yang menyelesaikan program kesetaraan. Indikator tersebut memberi dasar yang lebih kuat untuk menilai efektivitas PKBM dan menentukan perbaikan strategi pada periode berikutnya.

Perbedaan jumlah kasus antarwilayah memberi argumen bagi pendekatan prioritas bertahap. Kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah tinggi dapat menjadi lokasi awal verifikasi dan penjangkauan intensif, kemudian pengalaman pelaksanaan digunakan untuk memperbaiki prosedur di wilayah lain. Kendati demikian, jumlah absolut perlu dipadukan dengan jumlah penduduk usia sekolah agar wilayah berpenduduk kecil dengan risiko relatif tinggi tidak terabaikan. Penelitian ini tidak menghitung tingkat putus sekolah per kecamatan karena data pembandingan tersebut tidak disajikan.

Secara kelembagaan, peningkatan koordinasi sebaiknya diwujudkan dalam kesepakatan tentang alur informasi dan tindak lanjut kasus. Rapat koordinasi akan lebih memiliki nilai ketika menghasilkan daftar pekerjaan, tenggat waktu, serta penanggung jawab yang dapat diperiksa pada pertemuan berikutnya. Keterlibatan PKBM sejak awal juga penting agar pilihan pendidikan yang ditawarkan kepada keluarga sesuai kapasitas layanan dan kebutuhan peserta. Penggunaan data personal dalam koordinasi tetap memerlukan pengaturan akses yang proporsional.

Rancangan implementasi dapat mengikuti siklus sederhana: identifikasi, verifikasi, pendekatan keluarga, rujukan pendidikan, pendampingan, dan pemantauan keberlanjutan. Pada setiap tahap terdapat risiko putus proses, seperti alamat tidak ditemukan, keluarga menolak, persyaratan belum lengkap, atau anak berhenti mengikuti pembelajaran. Pencatatan alasan pada titik tersebut membantu pemerintah memahami mengapa suatu kasus belum terselesaikan dan menentukan tindak lanjut tanpa harus mengulang pendataan dari awal.

Dari sisi keberlanjutan, strategi memerlukan keseimbangan antara perluasan jangkauan dan kemampuan mempertahankan peserta. Menambah jumlah pendaftaran akan kurang bermakna apabila peserta kembali tidak aktif dalam waktu singkat. Karena itu, pengelolaan kasus sebaiknya dilanjutkan sesudah anak terdaftar, setidaknya sampai pemerintah memperoleh gambaran awal mengenai kehadiran dan hambatan belajarnya. Penguatan ini merupakan rekomendasi analitis, bukan hasil uji efektivitas program intervensi tertentu.

4. Kesimpulan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam penanganan anak putus sekolah telah mencakup empat unsur manajemen strategis, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Pemerintah telah mengidentifikasi penyebab putus sekolah, menyediakan pendidikan kesetaraan melalui PKBM, melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa, serta merencanakan pendataan dan penjangkauan sasaran. Namun, siklus strategi belum berjalan secara optimal karena akurasi data belum stabil, sosialisasi dan kunjungan keluarga belum merata, tidak tersedia anggaran khusus, bantuan pendidikan belum berkelanjutan, dan evaluasi belum menggunakan indikator hasil yang terukur. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya motivasi pendidikan, dorongan anak untuk bekerja, mobilitas penduduk, keterbatasan anggaran dan bantuan, serta kendala akses pada wilayah tertentu. Penguatan strategi perlu diarahkan pada pemutakhiran data secara berkala, penjangkauan aktif keluarga sasaran, koordinasi lintas sektor, dukungan biaya tidak langsung bagi keluarga rentan, perluasan layanan PKBM yang fleksibel, dan evaluasi berbasis outcome seperti jumlah anak kembali belajar, retensi, kehadiran, dan penyelesaian program kesetaraan.

Reference

1. Abd. Rahman rahim, H., & Radjab, E. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
3. Ahmad, I., Djajasinga, N. D., Astuti, S. D., Sanny, A., Cahyadi, N., Mamengko, R. P., & Reza, V. (2022). *Digital Marketing (Concept, Strategy, and Implementation)*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
4. Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
5. Assa Riswan. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1–12.
6. Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
7. Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sixth Edit). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
8. David J. Hunger., & Thomas L. Wheelen (2003). *Manajemen Strategis*, Terjemahan Julianto Agung S. Yogyakarta: Andi
9. Delvia, A., & Sujianto, S. (2024). Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 340–367.
10. Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu. (2022). Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026.
11. Febriana, M., & Rangkuti, M. R. (2023). Administration : Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Taktakan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 173–187.
12. Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia* (Issue v. 3). Jakarta: Gunung Agung.
13. Global Education Monitoring Report Team. (2018). Achieving gender equality in education: Don't forget the boys (Policy Paper 35). Paris: UNESCO.
14. Haudi. (2021). *Strategi Pembelajaran*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
15. Hidayat, M. T. N., Abdurrahman, A. I., & Suseno, A. (2024). Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMP di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 665–689.
16. Kaho, J. R. (1988). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
17. Limbong, S., Purnomo, A., & Halik, W. (2025). Strategi Pemerintah Kota Sorong Dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 3(1), 29–40.
18. Mulgan, G. (2010). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. OUP Oxford.
19. Nuriaini, Y. F., & Tinov, M. Y. T. (2023). Upaya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Mengantisipasi Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2021. *Jom Fisip*, 10, 1–11.
20. Ramayana, W. O. S., & Limuna, W. (2025). Strategi Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Berbasis Digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 1893–1905.
21. Sembiring, B. T., Asri, A. B., Maria, Y. A., & Riri, M. F. (2023). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
22. Supriatna, E. (2023). Inisiatif Partisipasi Sosial Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah : Studi Kasus Pada Jaringan Kerja Dan Kolaborasi Antara Lembaga Pemerintah , LSM , dan Masyarakat Sipil di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3).
23. Syam, Z. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Putus Sekolah di Kota Makassar= The Role of Local Government in Guiding School Dropout Children in Makassar City. *Universitas Hasanuddin*.
24. Taufiqurokhman. (2016). Manajemen strategik. *Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*.
25. UNESCO Office Bangkok and Regional Bureu for Education in Asia and the Pacific, & U. N. I. C. E. F. (2021). *Situation analysis on the effects of and responses to COVID-19 on the Education Sector in Asia: Indonesia case study*. UNESCO.
26. Yaneri, A., Vonika, N., & Suviani, V. (2022). Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Bagi Keluarga Miskin. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 4(1), 76–89.
27. Yuniar, D. P. (2021). Faktor penyebab putus sekolah pada anak di Wilayah Pedesaan (studi kasus di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 6(1), 99–107.
28. Zhu, B., Yang, M., & Chu, X. (2024). Good Governance and Innovation: Economic freedom matters. *Technological Forecasting and Social Change*, 205, 123527.
29. Zuchri Abdussamad, H., & Rapanna, P. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.